



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BNN PROVINSI BANTEN

RENCANA KERJA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BANTEN**

**2025
BANTEN
BERSINAR**



@INFOBNN_PROV_BANTEN



@BANTENINFOBNN



BNN PROVINSI BANTEN



BNN BANTEN CHANNEL

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana kerja ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Rencana Kerja ini merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2025-2029 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Rencana Kerja ini adalah dokumen perencanaan untuk periode satu 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNN Provinsi Banten sebagai unsur penunjang BNN RI dalam penyelenggaraan upaya P4GN khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi pada pencapaian tujuan Badan Narkotika Nasional.

Serang, 20 Januari 2025

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Banten**


Drs. Rohmad Nursahid, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Kondisi Umum Permasalahan Narkoba	1
2. Kondisi Capaian dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Narkoba Tahun 2024	3
3. Identifikasi Potensi dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penangan Permasalahan Narkoba.....	19
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL	21
1. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional	21
2. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi Operasional	25
BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN	29
BAB IV PENUTUP.....	34
LAMPIRAN I MATRIKS RENCANA KERJA BNN PROVINSI BANTEN	35
LAMPIRAN 2 KERANGKA LOGIS KINERJA.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum Permasalahan Narkoba

Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan BNN berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib menjabarkan dan mengoperasionalkan rencana kerjanya selama setahun.

BNN Provinsi Banten sebagai perpanjangan tangan BNN RI dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, dan harmonisasi Rencana Program Kerja ke dalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur.

Narkotika merupakan salah satu kejahatan *extra ordinary crime* sehingga membutuhkan perhatian khusus dan serius yang mendorong Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isi strategis dalam misi Asta Cita yang ke-7 (tujuh) yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan **narkoba**”.

Berdasarkan survey yang dilakukan BNN bersama BRIN pada tahun 2023, angka prevalensi di Indonesia mengalami penurunan, dari 1,95 %

tahun 2021 menjadi 1,73% tahun 2023. Prevalensi 1,73 artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia usia 15-64 tahun terdapat 173 orang terpapar narkoba dalam kurun 12 bulan terakhir atau setara dengan 3,33 juta jiwa. Adapun Jenis Narkoba yang paling banyak dipakai yaitu: Ganja dan Shabu. Permasalahan narkoba yang semakin meningkat di Banten ditunjukkan oleh banyaknya informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di daerah maupun di pedesaan.

Banten adalah provinsi terkecil kelima di Indonesia. Populasi penduduknya mencapai 12,25 juta jiwa pada tahun 2022. Secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota atau total 8 Kab/Kota. Provinsi Banten merupakan pintu gerbang dengan adanya Pelabuhan Merak maupun pelabuhan kecil lainnya dengan arus pergerakan manusia, barang dan jasa antar Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, Provinsi Banten memiliki garis Pantai sepanjang 499,62 kilometer, yang merupakan daerah pesisir yang menjadi sasaran masuknya narkoba karena kondisi geografis pantai yang cukup panjang dan lokasi yang masih dalam kategori *blank spot area*.

Pada tahun 2025 BNN Provinsi Banten berhasil mengungkap sebanyak 15 berkas perkara dengan 13 orang tersangka dan mengamankan barang bukti barang bukti narkoba shabu sebanyak 21.399,75 gram dan ganja sebanyak 118.972 gram. Data pegawai BNN Provinsi Banten per 20 Januari 2025, yaitu anggota POLRI sebanyak 11 Orang, PNS/ASN sebanyak 26 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 27 Orang sehingga total pegawai BNN Provinsi Banten sebanyak 65 Orang.

Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 BNN Provinsi Banten memperhatikan kondisi kerawanan narkoba di Provinsi Banten, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Banten tahun sebelumnya, serta berbagai permasalahan terkini yang dihadapi BNN Provinsi Banten dan BNN Kota/Kabupaten Jajaran.

2. Kondisi Capaian dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Narkoba Tahun 2024

Permasalahan narkoba di Provinsi Banten harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Provinsi Banten yang mendukung serta peningkatan peredaran. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Capaian dan evaluasi penanganan permasalahan narkoba pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan berbagai upaya guna meminimalisir jumlah penyalahguna narkoba di Provinsi Banten, sehingga dapat membentuk masyarakat yang imun terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang pada akhirnya menurunkan angka prevalensi.

Pencegahan memiliki dua tugas utama, yaitu melakukan diseminasi informasi dan advokasi. Kegiatan diseminasi informasi dilakukan melalui beberapa media, yaitu media konvensional tatap muka, pemanfaatan media cetak, placement radio lokal/daerah, kampanye/pagelaran seni, dan lain sebagainya. Sedangkan advokasi dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam melakukan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Banten.

Sepanjang Tahun 2024, BNNP Banten telah melakukan 255 kegiatan diseminasi informasi melalui berbagai media kepada kelompok pekerja (pemerintah dan swasta), pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat, sebagai berikut:

Tabel Data Sebaran Informasi BNN Provinsi Banten Tahun 2024

NO.	MEDIA DISEMINASI INFORMASI	JUMLAH KEGIATAN		SEBARAN INFORMASI
		DIPA	NON DIPA	
1.	<i>Placement</i> radio local	10	-	79.313
2.	Media cetak	2	-	40.000
3.	Media luar ruang	2	-	497.490
4.	Media Konvensional (Tatap Muka)	4	96	18.436
Total		18	96	635.239

Selain itu, BNN Provinsi Banten telah melaksanakan Advokasi kepada kelompok masyarakat diantaranya:

- Pengembangan Softskill kepada 20 guru Bimbingan Konseling dari 10 sekolah yang berlokasi di wilayah Kelurahan Banten, Kota Serang dan Desa Baros, Kabupaten Serang.
- Pembinaan Teknis Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, dan Fasilitasi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa di Kelurahan Banten, Kota Serang dan Desa Baros, Kabupaten Serang.
- Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba kepada 10 Keluarga di Kelurahan Banten, Kota Serang.
- Pencanaan DESA BERSINAR di Kelurahan Banten, Kota Serang dan Desa Baros kabupaten Serang
- Sosialisasi dan Promosi BNN Pada Pelaksanaan *Car Free Day* di Kota Serang dengan kegiatan berupa Informasi dan edukasi Bahaya Narkoba antara lain : pemeriksaan tekanan darah secara Gratis, Pengenalan K-9, Penyebaran *famflate* dan stiker yang didahului dengan Senam Bersama.

Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan alternatif, BNNP Banten melakukan berbagai kegiatan diantaranya:

- Pemetaan Potensi Kawasan Rawan di Kelurahan Banten, Kota Serang dalam Rangka Pemberdayaan terhadap Kawasan Rawan;
- Audiensi dengan stakeholder dalam rangka harmonisasi program pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan di Kelurahan Banten, Kota Serang;
- Bimbingan Teknis Life Skill bagi masyarakat kawasan rawan narkoba di Kelurahan Banten Kota Serang berupa pelatihan menjadi barista (pengolahan bisnis kopi) sebanyak 15 Orang mantan pecandu atau pengguna narkoba dengan memberikan 3 set alat pembuat Kopi;
- Pendataan IKRN (Indeks Kawasan Rawan Narkoba) terhadap 1552 Desa/Kelurahan dengan sasaran Kepala Desa, Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan 30 Masyarakat di masing-masing Desa/ Kelurahan telah selesai tercapai 100 % pada Tanggal 31 Oktober 2024
- Monitoring dan Evaluasi program pemberdayaan kawasan rawan di Kelurahan Banten, Kota Serang.

Lalu untuk kegiatan peran serta masyarakat, BNNP Banten melaksanakan

- Rapat Kerja Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 di Jakarta Pusat;
- Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang;
- Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) kepada Lingkungan Masyarakat Kota Serang;
- Bimtek Penggiat P4GN di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Masyarakat Provinsi Banten masing masing lingkungan terbentuk 30 penggiat anti narkoba;
- Sinkronisasi Program dan Kebijakan KOTAN di Kota Serang;

- *Workshop* Tematik P4GN kepada Lingkungan Masyarakat di Kota Cilegon;
- Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- Monev Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Masyarakat Provinsi Banten.

Selain itu BNN Provinsi Banten melakukan Tes Urine kepada Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Lingkungan Masyarakat dan Instansi Pendidikan sebanyak **1.184** orang dengan rincian sebagai berikut:

Data Pelaksanaan Tes Urine Deteksi Dini BNNP Banten Tahun 2024

No	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil		DIPA/ Non DIPA
					Positif	Negatif	
1	19 Januari 2024	Petugas MPP Kota Serang (DPMPTSP Kota Serang, Dinkes Kota Serang, DPUPR Kota Serang, Disdukcapil Kota Serang, BPJS Kesehatan)	MPP Kota Serang	19	0	19	NON DIPA
2	01 Maret 2024	Prajurit Grup 1 Kopassus	Rukan Griya Sena Baladika	25	0	25	NON DIPA
3	25 Maret 2024	Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Banten	BNNP Banten	5	0	5	NON DIPA
4	02-Apr-24	Pengemudi/A wak Kendaraan Umum	Terminal Tipe A Pakupatan Serang	22	0	22	NON DIPA
5	03-Apr-24	Pengemudi/A wak Kendaraan Umum	Terminal Tipe A Pakupatan Serang	11	0	11	NON DIPA
6	06-Apr-24	Pengemudi/A wak Kendaraan Umum	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten	24	0	24	NON DIPA
7	22-Apr-24	Pegawai kanwil DJP Banten	kanwil DJP Banten	41	0	41	NON DIPA

No	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil		DIPA/ Non DIPA
					Positif	Negatif	
8	29-Apr-24	Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kabupaten Pandeglang	Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kabupaten Pandeglang	97	0	97	NON DIPA
9	03 Mei 2024	Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kabupaten Pandeglang	BNNP Banten	13	0	13	NON DIPA
10	21 Mei 2024	33 OPD sebanyak 62 orang	Aula Lt. 1 Setda Kota Serang	62	0	62	NON DIPA
11	27 Mei 2024	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang	Halaman Pusat Pemerintahan Kota Serang	86	0	86	NON DIPA
12	05 Juni 2024	Mahasiswa baru Untirta	Auditorium Untirta	60	0	60	NON DIPA
13	21 Juni 2024	Karyawan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tanjung Gerem	BNNP Banten	60	0	60	NON DIPA
14	01 Juli 2024	Pegawai Balai Besar POM Serang, Kota Serang, Provinsi Banten	BBPOM Di Serang	105	0	105	NON DIPA
15	10 Juli 2024	Korem 064 / MY Bidang Intelijen Kota Serang, Provinsi Banten	Korem 064 / MY	50	0	50	NON DIPA
16	11 Juli 2024	Kodim 0603 / Lebak	Kodim 0603 / Lebak	30	0	30	NON DIPA
17	17 Juli 2024	Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten	PTA Banten	30	0	30	NON DIPA
18	19 Juli 2024	Pegawai Kejaksaan Negeri Serang, Kota Serang, Provinsi Banten	Kejari Serang	62	0	62	NON DIPA
19	23 Juli 2024	Tenaga Pendidik di SMAN 1 Kalanganyar	BNNP Banten	40	0	40	NON DIPA

No	Waktu Pelaksanaan	Peserta	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Hasil		DIPA/ Non DIPA
					Positif	Negatif	
20	13 Agustus 2024	Civitas Akademika Swiss German University (SGU) Campus, The Prominence Tower Alam Sutera di Tangerang Selatan, Banten	Swiss German University (SGU) Campus, The Prominence Tower Alam Sutera di Tangerang Selatan, Banten	15	0	15	NON DIPA
21	10-Sep-24	Anggota Kodim 0603/Lebak	Kodim 0603/Lebak	21	0	21	DIPA
22	13 Agustus 2024	Anggota Kodim 0601/Pandeglang	Kodim 0601/Pandeglang	26	0	26	DIPA
23	10 Oktober 2024	Masyarakat Kecamatan Taktakan Kota Serang	Aula Kecamatan Taktakan	49	0	49	DIPA
24	21 Oktober 2024	Masyarakat Kecamatan Tanara Kabupaten Serang	Aula Kecamatan Tanara Kabupaten Serang	49	0	49	DIPA
25	22 Oktober 2024	Anggota Grup 1 Kopassus	Aula Grup 1 Kopassus	65	0	65	DIPA
26	11-Nov-24	Pegawai Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktifitas (BBPVP) Serang	BBVP Serang	5	0	5	NON DIPA
27	14-Nov-24	Pegawai KPPN Serang	Kantor BNNP Banten	5	0	5	NON DIPA
28	14-Nov-24	Anggota Brigif 14 / MY / 1 Kostrad, Kab. Lebak, Provinsi Banten	Aula Mabrigif 14 / MY / 1 Kostrad, Kab. Lebak, Provinsi Banten	25	0	25	NON DIPA
29	18-Nov-24	Pegawai Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktifitas (BBPVP) Serang	BBVP Serang	15	0	15	NON DIPA
30	21-Nov-24	Anggota Batalyon Infanteri 318/Adhirajasa Yudha	garasi Pandur Yonif 318/AY Kostrad	67	0	67	NON DIPA
TOTAL				1.184	-	1.184	

BNN Provinsi Banten juga melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Instansi Pemerintah, Lingkungan Masyarakat dan Instansi Pendidikan untuk mendukung program P4GN diantaranya:

Tabel Rekapitulasi Perjanjian Kerja Sama BNN Provinsi Banten

NO	NAMA	NO PKS	TANGGAL PENETAPAN	MASA BERLAKU		KET
1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang dengan BNN Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Serang	Nomor: 500.16.7/089/DPMPTSP/2024 dan Nomor: PKS/05/II/KA/H M.04/2024/BN NP Banten	18 Januari 2024	1	Tahun	Instansi Pemerintah
2	Nota Kesepahaman antara BNN Provinsi Banten dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten tentang Sinergitas Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Nomor: PKS/19/V/KA/HM.04/2024/BNP Banten dan Nomor: 2024/HK.03.01/JI/2024	21 Mei 2024	3	Tahun	Instansi Pemerintah
3	Perjanjian Kerjasama antara BNN Provinsi Banten dengan Yayasan Bina Cerdas Mandiri tentang Penyebarluasan Informasi P4GN, Penggiat Anti Narkoba dan Tes/Uji Narkoba	Nomor: PKS/21/VII/KA/HM.04.04/2024/BNNP Banten dan Nomor: 001/BCMF/DA N-RIMetc/PKS-P4GN/V/2024	13 Mei 2024	2	Tahun	Lingkungan Masyarakat

NO	NAMA	NO PKS	TANGGAL PENETAPAN	MASA BERLAKU		KET
4	Perjanjian Kerjasama antara BNN Provinsi Banten dengan Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Provinsi Banten tentang Penyebarluasan Informasi P4GN, Penggiat Anti Narkoba dan Tes/Uji Narkoba di Provinsi Banten	Nomor: PKS/22/VII/KA/HM.04/2024/BNNP Banten dan Nomor: 001/DPD-GRANAT/Banten/PKS/VII/2024	07 Agustus 2024	2	Tahun	Lingkungan Masyarakat
5	Perjanjian Kerjasama antara BNN Provinsi Banten dengan SMK Pelayaran Nusantara Kota Serang tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Nomor: PKS/24/VIII/KA/HM.04/2024/BNNP Banten dan Nomor: 09/361/SMK-PN/PKS/VIII/2024	14 Agustus 2024	2	Tahun	Lingkungan Pendidikan
6	Perjanjian Kerjasama antara BNN Provinsi Banten dengan SMA Negeri 2 Malimping tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Nomor: PKS/26/IX/KA/HM.04.03/2024/BNNP Banten dan Nomor: 421.3/553/SMAN2-Mlp/IX/2024	05-Sep-24	2	Tahun	Lingkungan Pendidikan
7	Perjanjian Kerjasama antara BNN Provinsi Banten dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tentang Penyebarluasan Informasi P4GN, Penggiat Anti Narkoba dan Tes/Uji Narkoba	Nomor: PKS/28/IX/KA/HM.04.00/2024/BNNP Banten dan Nomor: 800/2646-BKD/IX/2024	14-Sep-24	2	Tahun	Instansi Pemerintah
8	Perjanjian Kerjasama antara BNN Provinsi Banten dengan SMA Negeri 1 Pamarayan tentang Pelaksanaan P4GN di SMA Negeri 1 Pamarayan Kabupaten Serang	Nomor: PKS/29/X/KA/HM.04.03/2024/BNNP Banten dan Nomor: 421.3/034/SM A-PMR/2024	17-Oktober-2024	2	Tahun	Lingkungan Pendidikan

NO	NAMA	NO PKS	TANGGAL PENETAPAN	MASA BERLAKU		KET
9	Perjanjian Kerjasama antara BNN Provinsi Banten dengan SDN Gowok Kecamatan Curug Kota Serang tentang Pelaksanaan P4GN SDN Gowok Kecamatan Curug Kota Serang	Nomor: PKS/30/X/KA/HM.04.03/2024/BNNP Banten dan Nomor: 421.1/011/SD-094/PKS/X/2024	25-Oktober-2024	2	Tahun	Lingkungan Pendidikan
10	Perjanjian Kerjasama antara BNN Provinsi Banten dengan DP3AKKB Provinsi Banten tentang Konseling Psikologi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cekatan	Nomor : 400.2.2/3454-DP3AKKB/2024 dan PKS/32/XII/KA/HM.04.00/2024/BNNP Banten	30 Oktober 2024	2	Tahun	Instansi Pemerintah

Serta dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN BNN Provinsi Banten mengkoordinasikan pelaporan B06 sebanyak 32 Instansi terdiri dari Pemerintah Kota Serang, dan B12 sebanyak 124 instansi terdiri dari, Pemprov Banten, Pemkab Serang, Pemkab Tangerang, Pemkab Pandeglang dan Pemkab Lebak.

b. Bidang Rehabilitasi

Untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten, BNN Provinsi Banten gencar melakukan berbagai upaya untuk mengajak pecandu dan penyalahguna narkoba melaporkan diri ke Klinik Pratama BNNP Banten dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang tersebar di seluruh Provinsi Banten. Rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba hingga pulih dan berfungsi sosial merupakan langkah yang tepat untuk menekan permintaan terhadap narkoba.

1. Rawat Jalan

Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi penyalahguna/korban/pecandu narkoba rawat jalan tahun 2024 di Provinsi Banten telah tercapai sebanyak 82 klien atau tercapai 114,14%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Data Layanan Rawat Jalan BNNP Banten Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET (ORANG)	CAPAIAN (ORANG)
1	Klinik Pratama BNN Provinsi Banten	70	82
Total			82

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)

Pada Tahun 2024 BNNP Banten menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) sebanyak 150 lembar atau tercapai sebesar 120% sebagai berikut :

Data Layanan SKHPN BNNP Banten Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARGET (ORANG)	CAPAIAN (ORANG)
1	SKHPN PNPB	125	150
2	SKHPN "0" Rupiah	-	0
Total			150

3. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

BNNP Banten mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses rehabilitasi dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda dan unsur pemerintahan desa/kelurahan setempat dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Unit IBM terbentuk binaan BNNP Banten tahun 2024 terdapat di 2 (dua) lokasi yaitu di Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang dan Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BNN RI No. KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024.

Dalam setiap Unit IBM terdapat Agen Pemulihan (AP) yang ditunjuk oleh Lurah/ Kepala Desa untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatan IBM di wilayahnya masing-masing. Saat ini jumlah agen pemulihan di

IBM Banten dan IBM Baros yaitu 11 orang. Sebelum menjalankan perannya para agen pemulihan diberikan pembekalan terlebih dahulu melalui kegiatan Bimbingan Teknis Petugas IBM yang diselenggarakan selama tiga hari oleh BNNP Banten agar mereka dapat menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan BNN untuk melakukan sosialisasi, pemetaan wilayah, penjangkauan maupun pendampingan pemulihan bagi para penyalahguna narkoba dalam kategori rendah. Adapun profil agen pemulihan di 2 (dua) unit IBM binaan BNNP Banten tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel Data Agen Pemulihan IBM BNNP Banten Tahun 2024

NO	LOKASI	IBM	LATAR BELAKANG KEMASYARAKATAN
1	M. KOMARUDIN	IBM KELURAHAN BANTEN	TOKOH AGAMA
2	ZAENAL MUSTAQIM		KELURAHAN
3	BAMBANG SUBONO		TOKOH MASYARAKAT/ KETUA RT
4	HERIYANTO		KEPEMUDAAN
5	BAYANI		KADER PKK
6	WULAN		KADER PKK
7	DEDY KUSNADY	IBM DESA BAROS	KELURAHAN/ TOKOH AGAMA
8	MUMU		FORUM RT/RW
9	OOD		FORUM RT/RW
10	MARYANI		KADER PKK
11	TATI		KADER PKK
Total Jumlah AP			11 ORANG

Selain melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan guna mendekatkan akses rehabilitasi di masyarakat, unit IBM juga

diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada penyalahguna di wilayahnya agar dapat pulih dan kembali berfungsi di masyarakat. Di tahun 2024 target Klien IBM sebanyak 10 (sepuluh) orang dari dua lokasi IBM, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel Data Klien Layanan IBM BNNP Banten Tahun 2024

NO	LOKASI	TARGET KLIEN (ORANG)	CAPAIAN (ORANG)
1	Kelurahan Banten, Kota Serang	10	9
2	Desa Baros, Kabupaten Serang		2
Total			11

4. Pascarehabilitasi

a. Pengukuran Kualitas Hidup

BNNP Banten melaksanakan pengukuran kualitas hidup dalam rangka pembinaan lanjutan kepada 40 orang klien yang telah mengikuti layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP dan IBM.

b. Program pendampingan pemulihan melalui kegiatan pengembangan produktivitas bagi Klien Rawat Jalan dan IBM

Masalah yang kerap timbul bagi klien rehabilitasi setelah kembali ke keluarga adalah masalah terkait pekerjaan dan keuangan, hal ini juga menjadi perhatian dalam program rehabilitasi berkelanjutan milik BNN. Harapannya setelah klien selesai menjalankan rehabilitasi, mereka dapat produktif dan kembali berfungsi sosial baik di keluarga ataupun masyarakat. Oleh karenanya Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Banten mencoba mensinergikan kebutuhan tersebut dengan program life skill bidang P2M BNNP Banten dengan melatih keterampilan wirausaha klien IBM di Kelurahan Banten dalam meracik kopi.

c. BNNP Banten juga mensinergikan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi korban penyalahguna napza milik Dinas Sosial Kota Serang untuk mendapatkan bantuan kewirausahaan bagi klien penyalahguna napza yang berdomisili di Kota Serang.

Bantuan yang diberikan berupa alat dan bahan untuk melakukan usaha senilai Rp. 2.400.000 per klien. Adapun jumlah klien yang mendapatkan bantuan sebanyak 11 Orang.

5. Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Klinik Pratama BNNP Banten melalui Penilaian Akreditasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, maka pada tanggal 27 - 28 Mei 2024 Klinik Pratama telah melakukan penilaian survey akreditasi dengan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna (LPA-PKP) secara online dan offline. Hasil dari penilaian akreditasi tersebut adalah **Paripurna**.

6. Peningkatan Kompetensi Teknis melalui Pelatihan Skrining dan Deteksi Dini Bagi Petugas Kesehatan dan K3 di Perusahaan

Peningkatan Kompetensi Teknis dilaksanakan selama tiga hari di Hotel Horison Ultima Ratu dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 25 Orang. Sasaran kegiatan ini adalah petugas kesehatan dan petugas K3 di 10 perusahaan di wilayah Banten dan juga pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. Dengan kegiatan peningkatan kompetensi teknis ini diharapkan peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terkait bahaya efek dan dampak penyalahgunaan narkoba, pengetahuan dan pemahaman tentang adiksi dan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap, mampu melakukan skrining dan deteksi diri narkoba dilingkungan, dan dapat melaksanakan program P4GN yang efektif di lingkungan kerjanya masing-masing.

7. Program Inovasi Skrining dan Deteksi Dini (SIDINI) Di Sekolah

Tingginya angka prevalensi penyalahguna pelajar di Provinsi Banten dan meningkatnya kenakalan remaja dan tawuran antar pelajar melatarbelakangi BNN Provinsi Banten menyusun program inovasi SIDINI (Skrining dan Deteksi Dini) di Sekolah. Program ini sudah berjalan selama 3 tahun bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Pada tahun 2024 terdapat 4 SMA/SMK Sederajat yang dilakukan Skrining dan deteksi dini dengan jumlah total pelajar yang diskruining yaitu 180 siswa. Hasilnya terdapat 29 siswa yang terindikasi merupakan korban penyalahguna narkoba yang kemudian dianjurkan untuk mengikuti program rehabilitasi di Klinik Pratama BNNP Banten.

8. Pelaksanaan Test Urine pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 8 tentang pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak tahun 2024 dan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2024 tentang syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Provinsi Banten, BNNP Banten bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten melakukan pelaksanaan test urine bagi para calon kepala daerah. Adapun bakal calon kepala daerah yang melaksanakan test urine sebagai berikut :

Tabel Daftar Peserta Tes Urin Pada Pilkada Serentak Tahun 2024

NO	PESERTA	JUMLAH PASLON	JUMLAH (ORANG)
1	Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	2 pasangan calon	4
2	Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang	3 pasangan calon	6
3	Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang	2 pasangan calon	4
4	Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang	4 pasangan calon	8

NO	PESERTA	JUMLAH PASLON	JUMLAH (ORANG)
5	Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak	3 pasangan calon	6
6	Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon	3 pasangan calon	6
Total			34

c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen

Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Banten terus berupaya dalam melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba serta memutus jaringan sindikat narkoba yang beroperasi di Provinsi Banten. Upaya pemberantasan jaringan narkoba di Provinsi Banten dilakukan dengan memperkuat intelijen bersinergi bersama instansi terkait, antara lain Pemerintah Provinsi, Polda Banten, Lanal Banten, Kanwil Kumham Provinsi Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Banten, Binda Provinsi Banten, Instansi terkait baik Instansi Pemerintah maupun Swasta, Penggiat Anti Narkoba, Akademisi dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat. Adapun rekapitulasi kasus Tindak Pidana Narkoba yang diungkap BNN Provinsi Banten sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Narkoba yang berhasil diungkap BNN Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel Data Pengungkapan Kasus Narkoba BNNP Banten Tahun 2024

KASUS	TARGET	REALISASI	JUMLAH P-21	JUMLAH TERSANGKA	PERSENTASE (%)
Tindak Pidana Narkoba	9 Berkas	15 Berkas	10 Berkas	13 Orang	166,67 %
Jumlah	9 Berkas	15 Berkas	10 Berkas	13 Orang	166,67 %

2. Barang Bukti Narkotika

Selama Tahun 2024, barang bukti yang berhasil diamankan di Provinsi Banten terdiri dari shabu dan ganja. Adapun rincian barang bukti sebagai berikut:

Tabel Barang Bukti yang Diamankan BNNP Banten Tahun 2024

NO	BARANG BUKTI	BERAT
1	Shabu	21.399,75 Gram
2	Ganja	118.972 Gram

3. Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Pelaksanaan TAT Januari s/d Desember 2024 telah mencapai 85 tersangka dengan jenis zat meliputi shabu dan ganja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Data Layanan TAT BNNP Banten Tahun 2024

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH
1	BARESKRIM POLRI	5
2	POLDA Banten	40
3	PELRESTA Serang Kota	19
4	POLRES Serang	6
5	POLRES Pandeglang	13
6	POLRES Lebak	6
Jumlah		89

3. Identifikasi Potensi dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penangan Permasalahan Narkoba

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi Banten, terdapat potensi maupun tantangan baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi Banten yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba di provinsi Banten, yaitu:

a. Potensi

1. Masuknya *point* pemberantasan narkoba dalam Asta Cita Presiden Prabowo sehingga meningkatkan komitmen dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;
2. Sinergitas terpadu antar stakeholder terkait dalam penanganan permasalahan narkoba dengan membentuk Satgas Anti Narkoba;
3. Adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat;
4. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integrasi dan kolaborasi melalui pelibatan banyak instansi penegak hukum;
5. Fasilitasi teknologi dalam mengungkap sindikat kejahatan narkoba yang terdapat di BNN RI.

b. Tantangan

1. Faktor Internal

- a) Terdapat anggaran untuk perjalanan dinas yang diblokir karena kebijakan penghematan tentunya membutuhkan strategi untuk penyesuaian terutama untuk proses penyelidikan dan penyidikan berkas perkara tindak pidana narkotika.
- b) Sumber daya manusia, baik di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota belum mendapatkan pengembangan/pelatihan kemampuan yang memadai;

- c) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNN Provinsi Banten dan BNNK Jajaran;
 - d) Baru terbentuk 3 (tiga) BNN Kabupaten/Kota dari 8 (delapan) kabupaten / kota di Provinsi Banten menjadikan pelaksanaan P4GN belum maksimal untuk menjangkau seluruh pelosok Provinsi Banten.
2. Problematika pengawasan peredaran.
- a) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga masyarakat.
 - b) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
 - c) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau dan pesisir Pantai.
3. Terbatasnya tempat rehabilitasi rawat inap di Provinsi Banten yang mengakibatkan banyaknya pecandu dan korban penyalahguna narkoba tidak mendapatkan akses rehabilitasi sesuai hasil assesment termasuk yang sudah menjalani TAT sehingga lapas/rutan *over capacity*. Selain itu belum tersedianya anggaran untuk pengantaran pecandu dan/atau korban penyalahguna yang sudah *inchrach* ke balai rehabilitasi di luar Provinsi Banten.
4. Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
5. Stigma negatif yang masih kental di masyarakat terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba sehingga mereka memiliki rasa malu dan takut untuk melaporkan diri secara sukarela serta kurangnya kesadaran orang tua pecandu(orang tua pecandu baru akan bertindak jika anaknya telah menunjukkan hal yang serius, misalnya telah mengalami gejala gangguan mental dan overdosis serta kriminal).

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

1. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional

Sejalan dengan Asta Cita sebagai Misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.



Tujuan Organisasi BNN Provinsi Banten sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan menyelamatkan Masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Indikator: Angka Prevalensi

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan

pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan transformasi layanan public yang berkualitas. Indikator:
Indikator Pelayanan Publik

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Banten sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis BNN yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Terwujudnya manajemen organisasi, professional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran nasional. Arah kebijakan BNN tahun

2020-2024 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN, yaitu:

1. Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk menekan masuknya narkoba ke Indonesia melalui titik masuk peredaran narkoba. Kebijakan ini mencakup penguatan sarana prasarana di daerah titik rawan sebagai titik masuknya barang di pelabuhan, pengawasan jalur-jalur tikus daerah perbatasan, dan sinergitas pemangku kepentingan dalam mencegah masuknya barang dari Luar Negeri ke Dalam Negeri. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi melaksanakan *active defense* melalui penguatan kerjasama dan penggalangan informasi di luar negeri serta peningkatan sarana dan prasarana di perbatasan negara dan *entry point*.
2. Arah kebijakan 2 (dua) dirumuskan untuk meningkatkan daya kemampuan dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup peningkatan kemampuan SDM diantaranya untuk melakukan pemetaan dan pemusnahan lahan tanaman terlarang, pengawasan teknologi siber yang rawan sebagai media peredaran gelap narkoba, pengawasan tata kelola psikotropika dan prekursor narkoba di sektor industri, pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan peredaran dan produksi narkoba, penindakan dan penyidikan kejahatan narkoba, operasi di lokasi pusat peredaran, pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset, penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi pengembangan kemampuan penyelidikan dan penyidikan serta penguatan kerjasama instansional dalam dan luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.
3. Arah kebijakan 3 (tiga) meliputi antara lain: pengembangan metode pendidikan anti narkoba (disesuaikan dengan basis jenjang usia, keragaman *background* kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan

berbasis masyarakat, inovasi diseminasi informasi melalui media massa dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, penindakan penyalahgunaan narkoba, penyediaan saluran laporan tindakan penyalahgunaan, pengembangan informasi penyalahgunaan. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Reformasi Manajemen Pendidikan Anti Narkoba Khususnya Pada Kalangan Generasi Muda dan Advokasi Publik Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika; dan (2) Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan dan Kelembagaan Lokal dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

4. Arah kebijakan 4 (empat) mencakup perlindungan dan penyelamatan penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika sehingga meminimalisir kemungkinan *relaps*. Cakupannya antara lain meliputi: pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi, pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan. Adapun strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Penguatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi; dan (2) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Berkelanjutan pada Layanan Rehabilitasi Pemerintah dan Non-Pemerintah.
5. Arah kebijakan 5 (lima) memiliki cakupan dalam hal memperluas dan memperkuat hubungan dan kemitraan kelembagaan, mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan sistem hukum, dan menumbuhkembangkan tradisi riset dan inovasi dalam mendesain kebijakan P4GN. Arah kebijakan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan model arah kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Pada prakteknya arah kebijakan ini akan melahirkan kegiatan yang mampu menjadi *supporting* bagi kinerja core business dan berdampak bagi masyarakat. Strategi untuk mencapai

sasaran ini adalah: (1) Memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penguatan sistem hukum dan jaringan arsitektur kinerja P4GN; dan (2) Memperkuat riset sebagai dasar pengembangan kebijakan bidang P4GN dan diperkuat teknologi.

6. Arah kebijakan 6 memiliki cakupan antara lain peningkatan tata kelola organisasi, peningkatan pemanfaatan ICT, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, hingga yang paling makro yakni peningkatan pelayanan publik oleh kelembagaan BNN. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan kerja dan proses bisnis kelembagaan BNN dengan didukung kualitas regulasi, profesionalisme ASN dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi Operasional

Arah kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Banten merupakan turunan dari rumusan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi BNN. Arah kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Banten juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Peningkatan indeks ketahanan remaja dan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba;
2. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam P4GN;
3. Peningkatan kualitas hidup korban penyalahgunaan narkoba;

4. Peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi, kualitas lembaga rehabilitasi, dan indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi;
5. Peningkatan pengungkapan kasus narkoba di wilayah Provinsi Banten termasuk pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba;
6. Peningkatan nilai kinerja anggaran, IKPA, dan tata kelola reformasi birokrasi;
7. Peningkatan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* terkait dalam melaksanakan P4GN.

Pada tahun 2025 penyelarasan strategi dari BNN RI yang dimandatkan kepada BNN Provinsi Banten dalam penetapan kinerja terdiri dari 15 sasaran dengan 19 indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba di Provinsi yang mengalami peningkatan drajat keterpulihan	2 Kawasan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	2,50 Indeks
5	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	71,40 %
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	4 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,53 Indeks
9	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Jaringan
10	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas Perkara
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	"Sangat Baik"
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 Kabupaten/Kota
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN	98,13 Indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
15	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	83,10 Indeks

BAB III

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menetapkan rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2025. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN periode tahun 2025 di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Banten Tahun 2025 digabungkan bersama dengan rencana kerja BNN Kota Tangerang Selatan, BNN Kota Cilegon, dan BNN Kota Tangerang dan usulan dari Bidang dan Bagian di BNN Provinsi Banten. Rencana kerja Tahun 2025 berisikan yaitu:

- a. Target kinerja BNN Provinsi Banten adalah akumulasi target seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Banten;
- b. Pendanaan pada rencana kerja merupakan akumulasi pendanaan seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Banten;
- c. Rencana kerja dan pendanaan telah mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah Banten;
- d. Rencana Kerja dan pendanaan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 2025 membutuhkan masukan (input) berupa pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan perincian berdasarkan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, uraian kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada table Kebutuhan Pendanaan BNN Provinsi Banten dan jajaran Tahun 2025.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Pencapaian target kinerja memungkinkan kita mengidentifikasi sejauhmana kemampuan satker dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra satker, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra satker, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025 yang ditetapkan secara menyeluruh dan terpadu memberikan kesatuan pandangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, terdiri dari:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - a. Kegiatan Penyelenggaran Advokasi;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi;
 - c. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba;
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat;
 - e. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti;
 - f. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
 - g. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
 - h. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika;
 - i. Kegiatan Pengeloaan Informasi Edukasi.

2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
 - b. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya.
 - c. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN.
 - d. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan

Adapun kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Banten beserta jajaran untuk tahun 2025 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/ Kota	341.000.000
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/ Kota	300.000.000
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota	343.235.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN PENDANAAN
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba di Provinsi yang mengalami peningkatan drajat keterpulihan	2 Kawasan	150.000.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	2,50 Indeks	
5	Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	71,40 %	121.735.000
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	56.148.000
7	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga	607.010.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	4 Unit	
8		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,53 Indeks	
9	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang	1 Jaringan	250.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN PENDANAAN
		prekursor narkoba	berhasil dipetakan		
10	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20 Berkas Perkara	900.000.000
11	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	388.525.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	
13	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	"Sangat Baik"	152.212.000
			Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 Kabupaten/Kota	
14	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN	98,13 Indeks	11.874.132.000
			Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/Kota	
15		Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	83,10 Indeks	0

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja BNN Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Banten. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kerja ini menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Banten, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian di kemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 202 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 2025. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang. Sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten untuk dapat dioperasionalkan membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendanaan. Dari aspek pendanaan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan BNN Provinsi Banten dan BNNK Jajaran pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.15.483.997.000,-.

LAMPIRAN I
MATRIKS RENCANA KERJA BNN PROVINSI BANTEN

Unit Kerja : BNN Provinsi Banten

Tahun : 2025

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kabupaten / Kota	341.000.000
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kabupaten/ Kota	300.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3	Kabupaten/ Kota	343.235.000
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba di Provinsi yang mengalami peningkatan drajat keterpulihan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	2 2,50	Kawasan Indeks	150.000.000
5	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	71,40	%	121.735.000
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5	Orang	56.148.000

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
7	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1	Lembaga	607.010.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih Rehabilitas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	4	Unit	
8		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitas BNN	3,53	Indeks	
9	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	Jaringan	250.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
10	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika dan Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20	Berkas Perkara	900.000.000
11	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	Indeks	388.525.000
			Nilai Tingkat Keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks	
12	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	"Sangat Baik"	-	152.212.000
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3	Kabupaten/ Kota	

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,13	Indeks	11.874.132.000
		Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3	Kabupaten/ Kota	
11		Meningkatnya pengelola reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	83,10	Indeks	0

LAMPIRAN 2
KERANGKA LOGIS KINERJA
MENGACU PADA INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Tim Kerja	Kontrol Kerangka Logis
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kabupaten / Kota	Pencegahan	Ada mengacu pada matriks peran hasil
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kabupaten/ Kota	Pencegahan	Ada mengacu pada matriks peran hasil
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3	Kabupaten/ Kota	Pencegahan	Ada mengacu pada matriks peran hasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Tim Kerja	Kontrol Kerangka Logis
1	2	3	4	5		
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba di Provinsi yang mengalami peningkatan drajat keterpulihan	2	Kawasan	Pemberdayaan Masyarakat	Ada mengacu pada matriks peran hasil
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	2,50	Indeks	Pemberdayaan Masyarakat	Ada mengacu pada matriks peran hasil
5	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	71,40	%	Rehabilitasi	Ada mengacu pada matriks peran hasil
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5	Orang	Rehabilitasi	Ada mengacu pada matriks peran hasil
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1	Lembaga	Rehabilitasi	Ada mengacu pada matriks peran hasil
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih Rehabilitas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah	4	Unit	Rehabilitasi	Ada mengacu pada matriks peran hasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Tim Kerja	Kontrol Kerangka Logis
1	2	3	4	5		
	layanan rehabilitas narkotika	provinsi				
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,53	Indeks	Rehabilitasi	Ada mengacu pada matriks peran hasil
9	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	Jaringan	Pemberantasan	Ada mengacu pada matriks peran hasil
10	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P- 21	20	Berkas Perkara	Pemberantasan	Ada mengacu pada matriks peran hasil
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	Indeks	Pemberantasan	Ada mengacu pada matriks peran hasil
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks	Pemberantasan	Ada mengacu pada matriks peran hasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Tim Kerja	Kontrol Kerangka Logis
1	2	3	4	5		
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	"Sangat Baik"	-	Umum	Ada mengacu pada matriks peran hasil
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3	Kabupaten/ Kota	Umum	Ada mengacu pada matriks peran hasil
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,13	Indeks	Umum	Ada mengacu pada matriks peran hasil
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3	Kabupaten/ Kota	Umum	Ada mengacu pada matriks peran hasil
15	Meningkatnya pengelola reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	76	Indeks	P2M, Rehabilitasi, Pemberantasan dan Umum	Ada mengacu pada matriks peran hasil

Serang, 20 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Banten



Drs. Rohmad Nursahid, M.Si

CONTACT US

 **@INFOBNN_PROV_BANTEN**

 **@BANTENINFOBNN**

 **@BNN PROVINSI BANTEN**

 **@BNN BANTEN CHANNEL**